

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data dan Sampel

Sumber data yang digunakan merupakan data publikasi yang berupa statistik keuangan daerah provinsi lampung yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dengan periode tahun 2020-2022. Berikut adalah hasil pengambilan sampel menggunakan metode *cluster random sampling*:

Tabel 4.1 Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Provinsi Lampung	1
2	Kabupaten/Kota yang terdaftar sebagai wilayah di provinsi Lampung	15
3	Tahun Penelitian	3
	Jumlah	48

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Maka hasil sampel yaitu berjumlah 48. Karena data provinsi Lampung dan kabupaten/kota yang terdaftar di provinsi lampung berjumlah 15 wilayah yang merupakan objek yang diteliti dan masa penelitian selama 3 tahun. Jadi jumlah observasi dalam penelitian ini berjumlah 48 sampel.

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. (Ghozali; 2019)

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	48	726659034	21518167508	2657380552.58	4882657236.024
X2	48	763887825	21737229232	2651036289.00	4871563942.705
X3	48	164816	9269110	1146935.33	2132423.796
X4	48	1	3	1.35	.699
Y	48	0	1	.83	.377
Valid N (listwise)	48				

Sumber: data diolah SPSS, 2025

1. Kekayaan Daerah

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel independen kekayaan daerah dengan jumlah sampel (N) sebanyak 48 menunjukkan nilai minimal sebesar Rp. 726.659.034 (Ribu rupiah), dan nilai maksimal sebesar Rp. 21.518.167.508 (Ribu rupiah). Nilai rata – rata dalam variabel ini yaitu sebesar Rp. 2.657.380.552,58 dengan standar devisiasi sebesar 4.882.657.236,024.

2. Belanja Daerah

Variabel Belanja Daerah menunjukkan nilai minimal sebesar Rp. 763.887.825 dan nilai maksimal sebesar Rp. 21.737.229.232. Nilai rata – rata dalam variabel ini yaitu sebesar Rp. 2.651.036.289.00 dengan standar devisiasi sebesar 4.871.563.942.705.

3. Jumlah Penduduk

Variabel jumlah penduduk menunjukkan nilai minimal sebesar 28.962 dan nilai maksimal sebesar 9.269.110. Nilai rata – rata dalam variabel ini yaitu sebesar 1.146.935.33 dengan standar devisiasi sebesar 2.132.423.796.

4. Opini Publik

Variabel opini publik menunjukkan nilai minimal sebesar 1 dan nilai maksimal sebesar 3. Nilai rata – rata dalam variabel ini yaitu sebesar 1,35 dengan standar deviasi sebesar 0,699.

4. Publikasi LKPD Provinsi Lampung di Internet

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Publikasi LKPD dalam penelitian ini adalah level dengan jumlah sampel (N) sebanyak 48 dengan nilai terkecil (minimum) 0 dan nilai terbesar (maksimum) 1 (dummy). Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,83 dengan standar deviasi sebesar 0,377.

4.3 Analisis Regresi Logistik

4.3.1 Menilai Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dapat dievaluasi dengan uji kesesuaian model *Hosmer and Lemshow's Goodnes of Fit Test*. Untuk kelayakan model regresi digunakan uji chi-square yaitu model dikatakan mampu memprediksi nilai observasi jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,005. Hasil pengujian kelayakan model regresi disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kelayakan Moder Regresi

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	5.141	8	.742

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan nilai chi-squared sebesar 5,141 dengan nilai signifikansi sebesar 0,742. Hasil ini menunjukkan bahwa signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model dapat memprediksi nilai observasinya, atau dapat dikatakan model tersebut dapat diterima karena cocok dengan data observasi.

4.3.2 Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit Test*)

Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah model hipotetis sesuai dengan data. Asumsi untuk mengevaluasi kesesuaian model adalah sebagai berikut: H_0 : Model hipotetis dilampirkan pada data dan H_a : model hipotetis tidak sesuai dengan data.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) di awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) di akhir (Block Number = 1). Jika nilai probabilitasnya menurun maka menunjukkan model regresi baik atau dengan kata lain diasumsikan model tersebut sesuai dengan data. Hasil keseluruhan fit model disajikan pada Tabel 4.3.2 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Menilai Model Fit

-2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 0)	-2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 1)
23,573	18,584

Sumber: Data yang diolah, 2025

Dari Tabel 4.4, nilai awal -2LL sebesar 23,573, dan setelah memasukkan kedua variabel independen, nilai akhir -2LL menurun menjadi 18,584 atau 4,989. Nilai tereduksi sebesar -2LL ini menunjukkan model regresi yang baik atau dengan kata lain model hipotesis sesuai dengan data.

4.3.3. Menilai Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Nagelkerke R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell's untuk memastikan nilainya bervariasi dari 0 hingga 1. Caranya dengan membagi nilai Cox and Snell's R Square dengan nilai maksimumnya. Hasil Nagelkerke R Square ditunjukkan pada Tabel 4.3.3 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Koefisien Determinasi

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	27.060 ^a	.286	.482

a. Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,482 yang berarti variabilitas variabel dependen Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet yang dapat dijelaskan oleh variabel kekayaan dan belanja daerah sebesar 48,2%, sedangkan sisanya sebesar 51,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variable penelitian.

4.3.4 Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi model regresi dalam memprediksi kemungkinan tercapainya peringkat obligasi suatu perusahaan. Kekuatan prediksi model regresi dalam memprediksi probabilitas terjadinya variabel dependen dinyatakan dalam persentase. Hasil matriks klasifikasi model regresi ditunjukkan pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Identifikasi Prediksi Klasifikasi

Classification Table^a					
	Observed		Y	Predicted	Percentage Correct
				Ya	
Step 1	<i>Publikasi</i>	Tidak	5	3	62.5
	<i>LKPD</i>	Ya	2	38	95.0
	Overall Percentage				89.6

a. The cut value is .500

Berdasarkan klasifikasi di atas menunjukkan bahwa daya prediksi model regresi dalam memprediksi probabilitas publikasi laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung di internet adalah 89,6%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi, terdapat 38 laporan keuangan pemerintah daerah (95,0%). Sementara itu, lima pemerintah daerah tidak memuat laporan keuangan di website mereka. Berdasarkan penjelasan tersebut maka persentase keseluruhannya adalah 89,6% yang berarti keakuratan sampel penelitian ini adalah 89,6%.

4.3.5 Hasil Model Regresi yang Terbentuk dan Pengujian Hipotesis

Analisis model regresi logistik pada penelitian ini bertujuan untuk melihat pentingnya setiap koefisien dalam regresi logistik ini. Persamaan model yang digunakan termasuk seluruh variabel independen disajikan pada Tabel 4.3.5 di bawah ini:

Tabel 4.7 Uji Signifikansi Data

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Kekayaan Daerah	.000	.000	.249	1	.618	1.000
	Belanja Daerah	.000	.000	.055	1	.815	1.000
	Jumlah Penduduk	.000	.000	1.468	1	.226	1.000
	Opini Audit	-1.935	.657	8.673	1	.003	.144
	Constant	1.609	3.551	.205	1	.651	4.996

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4.

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik pada tabel di atas, model regresi logistik dapat dilatih dengan melihat nilai estimasi parameter-parameter pada variabel-variabel yang ada pada persamaan. Model regresi dilatih berdasarkan estimasi nilai parameter pada variabel-variabel pada persamaan sebagai berikut:

$$\text{Publikasi} = 1,609 + 0,000 \text{ Kekayaan Daerah} + 0,000 \text{ Belanja Daerah} + 0,000 \text{ Jumlah penduduk} - 1,935 \text{ Opini Audit} + e$$

Keterangan :

Publikasi= publikasi laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung di internet (dummy, 1 jika tersedia, 0 jika tidak)

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = error.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi (sig) dengan tingkat kesalahan (α) yaitu 5% atau 0,05. Hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Variabel kekayaan daerah mempunyai koefisien regresi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 0,618 lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan hipotesis pertama ditolak, bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet.
2. Variabel tingkat belanja daerah mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 0,815 lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan hipotesis kedua ditolak yaitu belanja daerah menurut wilayah tidak berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet
3. Variabel tingkat jumlah penduduk mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 0,226 lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan hipotesis ketiga ditolak yaitu jumlah penduduk menurut wilayah tidak berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet
4. Variabel opini audit mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan hipotesis keempat diterima yaitu opini audit menurut wilayah berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet

4.4 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet dengan studi kasus pemerintah daerah di Lampung. Setelah dilakukan pengujian hipotesis, maka penjelasan masing-masing variabel akan diuraikan sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, variabel kekayaan daerah mempunyai tingkat signifikan sebesar $0,618 > \alpha = 5\%$, yaitu variabel kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2022 yang mempunyai aset besar di daerahnya tidak dapat dijadikan acuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah bertindak transparan dalam keterbukaan laporan keuangan di daerahnya melalui Internet.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hardianto dan Murtin (2020) yang menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR), hal ini disebabkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan laporan keuangan. properti milik lokal. pemerintah, sehingga mustahil bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki aset daerah yang besar tidak mempengaruhi mereka untuk mengungkapkan informasi keuangannya pada website pemerintah daerah.

Faktanya, pemerintah daerah dengan pendapatan asli daerah yang tinggi dilaporkan baik-baik saja, sehingga bisa membangun citra yang baik jika melapor ke masyarakat. Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Nosihana & Yaya (2016) dan Juniantika & Hapsari (2020) yang menyimpulkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan internet pemerintah daerah. petunjuk arah. Tingginya tingkat kekayaan suatu daerah tidak akan mempengaruhi laporan keuangan. Besarnya aset daerah tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, dimana masyarakat memerlukan informasi keuangan yang diungkapkan oleh pemerintah daerah dalam e-Government (Nosihana & Yaya, 2016).

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh Jafaru dan Francis (2016), Pratama et al. (2015), Syofyani dan Dwirama (2019) menunjukkan bahwa kekayaan daerah berdampak positif terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet, dimana semakin tinggi kekayaan di suatu wilayah maka semakin tinggi pula kekayaannya. Popularitas ingin mengungkap laporan tersebut keuangan daerah melalui Internet. Memang pemerintah akan memberikan bukti nyata kepada masyarakat mengenai kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

4.4.2 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet

Hipotesis alternatif 2 (H_{a2}) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet. Hasil uji regresi menunjukkan belanja per daerah mempunyai tingkat signifikansi $0,815 > \alpha = 5\%$ yang berarti belanja per daerah berpengaruh terhadap laporan keuangan di Internet. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Putri dan Setiawan (2022) bahwa semakin rendah belanja daerah pemerintahan daerah provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 maka IFR pemerintah daerah tersebut akan

semakin tinggi dan sebaliknya semakin tinggi belanja daerah maka IFR akan semakin rendah.

Pelaporan Keuangan Internet (IFR) untuk pemerintah daerah. Artinya daerah yang nilai belanja per kapitanya besar cenderung mengungkapkan informasi keuangan di internet dengan kualitas yang rendah (Purwanti dkk, 2017). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Purwanti dkk. (2017) dan Diptyana (2019) yang juga menunjukkan bahwa belanja daerah berdampak negatif terhadap IFR. Hal ini nampaknya terjadi karena pemerintah daerah lebih fokus pada penyediaan layanan langsung yang dapat dirasakan masyarakat dibandingkan pendanaan layanan informasi keuangan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhajriana (2017), Pratama dkk (2015) dan Masra (2020) mengemukakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet, dimana belanja di daerah yang lebih tinggi, keinginan pemerintah terhadap Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah juga semakin meningkat, karena pemerintah daerah dengan belanja daerah yang tinggi akan menunjukkan dan memberikan bukti bahwa mereka telah menggunakan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4.4.3 Pengaruh jumlah penduduk terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet

Variabel tingkat jumlah penduduk mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 0,226 lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan hipotesis ketiga ditolak yaitu jumlah penduduk menurut wilayah tidak berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet

Jumlah penduduk berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pada website pemda. Hal ini menunjukkan

bahwa besarnya jumlah penduduk bukan faktor yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transparansi informasi keuangan pada website. Jumlah penduduk suatu daerah menggambarkan kompleksitas dari suatu pemerintahan daerah. Besarnya jumlah penduduk mencerminkan besarnya layanan kebutuhan masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah. Hal ini akan membuat bertambahnya pekerjaan pemerintah yang mengakibatkan informasi yang harus disajikan pemerintah untuk transparansi informasi keuangan semakin banyak. Kompleksitas ini justru menghambat pemerintah dalam melakukan transparansi. Pemerintah tidak terdorong untuk melakukan transparansi yang merupakan bentuk tanggungjawab dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasanah (2016) yaitu jumlah penduduk berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap publikasi informasi keuangan di website. Selain itu, temuan penelitian ini didukung oleh Afryansyah & Haryanto (2013) yang menemukan besarnya jumlah penduduk tidak mempengaruhi pemerintah untuk mempublikasikan informasi akuntansinya di internet.

4.4.4 Pengaruh opini audit terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet

Variabel opini audit mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan hipotesis keempat diterima yaitu opini audit menurut wilayah berdampak negatif terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet.

Hal ini menandakan bahwa semakin besar nilai opini audit maka semakin besar pula tingkat transparansi informasi keuangan Pemda. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Sulardi (2018) menemukan bahwa opini audit mempengaruhi publikasi informasi keuangan secara wajib dan secara sukarela. Penelitian ini juga konsisten serupa dengan Wau & Ratmono (2015) yang memperoleh hasil opini audit berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan pemerintah di internet. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Styles & Tennyson (2007) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang

mendapatkan penghargaan atas praktek pelaporan keuangan yang baik oleh organisasi eksternal, maka pemda tersebut cenderung mempublikasikan laporan keuangannya di internet.

Opini audit mampu mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi informasi keuangan. Laporan keuangan yang mendapatkan opini yang baik dari BPK mengindikasikan akuntabilitas dan kinerja suatu pemerintah daerah baik. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mendapatkan dua jenis opini yaitu wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian. Hal tersebut membuat pemda cenderung tidak akan menutup-nutupi hasil dari kinerjanya yang baik kepada masyarakat. Pemda yang mempublikasikan informasi keuangan dengan opini bagus akan menaikkan citra baik pemda tersebut serta menandakan bahwa pemda telah melaksanakan jalannya pemerintahan secara bersih dan bertanggungjawab.